

KEBIJAKAN POLITIK PENDIDIKAN DI INDONESIA

Asep Imam Munandar

Prodi Manajemen Pendidikan Islam (S2)

Program Pascasarjana UIN Sultan Maulana hasanuddin Banten

asepimammunandar@gmail.com

ABSTRAK

Pendidikan memiliki ruang untuk melakukan kritik atas kekuasaan yang menyeleweng, dan politik kita harus membuka pandangan kita bahwa politik itu sebagai suatu seni yang memungkinkan sesuatu atau mewujudkan sesuatu. Maka ketika kita niatan, cara, atau tujuan berpolitik itu baik, politik bukanlah sesuatu yang kotor, justru mulia, baik, natural, dan alamiah sebagai bentuk kemanusiaan dari manusia sebagai individu karena setiap orang yang hidup didunia memiliki keinginan, harapan, impian. politik dan pendidikan sama-sama berkaitan dengan urusan manusia hidup didunia, sama-sama sebagai salah satu alat atau jalan manusia untuk mencapai tujuannya, dan manusia sama sekali tidak bisa dikatakan apolitis dan tidak berpendidikan secara total. Manusia sekecil apa pun tetap berpolitis dan berpendidikan. Perbedaannya, politik lebih berkaitan dengan pencapaian posisi manusia dalam wilayah atau sebuah kekuasaan, baik itu skala besar ataupun skala kecil, sementara pendidikan lebih pada pencapaian manusia memperoleh pengetahuan, kecerdasan, dan keterampilan untuk persiapan hidup kedepan atau terjun dalam masyarakat yang lebih luas.

Kata kunci: kebijakan, politik, pendidikan, Indonesia

PENDAHULUAN

Ketika kita masih berada didalam tingkatan orang awam dan membatasi pengertian pendidikan, kita hanya mengetahui bahwa pendidikan berkaitan dengan sekolah, buku, belajar, ujian, dan uang jajan lintas ijazah. Kemudian dipihak lain kita hanya membatasi kata *politik* sebagai sesuatu yang hanya berkaitan dengan kekuasaan, dan kekuasaan digolongkan dengan orang-orang yang berkedudukan tinggi (golongan atas), dan kemudian kita juga membatasi kata politik dengan hal-hal yang berkaitan dengan kotor, tipu

muslihat, permainan licik yang dilakukan oleh para politikus, pemegang kekuasaan disebuah wilayah, dan tidak ada nilai moralnya sama sekali kecuali yang ada dipikiran kita hanyalah pikiran negatif semua.

Dan ketika kita masih memberikan batasan pada kedua pengertian tersebut maka , pendidikan dan politik itu tidak akan pernah menyatu, tentu saja kita menjadikan pendidikan dan politik sebagai layaknya air dan minyak, tetapi apakah realitasnya demikian ? apakah kita tidak bisa melihat bagaimana para pemegang kekuasaan di Indonesia adalah kebanyakan orang-orang yang berasal dari lulusan sebuah pendidikan ,baik pendidikan negeri, swasta, maupun pendidikan alternative?

Dari situlah kita harus menyadari bahwa pendidikan itu memiliki daya dan ruang kekuasaan. Pendidikan memiliki ruang untuk melakukan kritik atas kekuasaan yang menyeleweng, dan politik kita harus membuka pandangan kita bahwa politik itu sebagai suatu seni yang memungkinkan sesuatu atau mewujudkan sesuatu. Maka ketika kita niatan, cara, atau tujuan berpolitik itu baik, politik bukanlah sesuatu yang kotor, justru mulia, baik, natural, dan alamiah sebagai bentuk kemanusiaan dari manusia sebagai individu karena setiap orang yang hidup didunia memiliki keinginan, harapan, impian.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan penulisan dari makalah ini sebagai berikut: mengetahui pengertian politik dan pendidikan, mengetahui kebijakan politik pendidikan di Indonesia, serta mengetahui peran politik pendidikan.

PEMBAHASAN

1. Pengertian Politik dan Pendidikan

Menurut Roger F.Soltau dalam *introduction to Politics* , pengertian politik adalah ilmu yang mempelajari Negara, tujuan-tujuan Negara, dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan-tujuan itu.

Menurut J. Barent dalam *ilmu Politika*, pengertian politik yaitu ilmu yang mempelajari kehidupan Negara yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat dan juga mempelajari Negara-negara itu melakukan tugas-tugasnya.

Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata politik diartikan sebagai berikut :

- a. Pengetahuan tentang ketatanegaraan atau kenegaraan, yaitu mengenai sistem pemerintahan, dan dasar-dasar pemerintahan.
- b. Segala urusan dan tindakan, kebijakan, dan siasat.
- c. Kebijakan, cara bertindak didalam menghadapi masalah tertentu.

Lalu sekarang kita berarilah pada pengertian pendidikan, pendidikan didalam Kamus Bahasa Arab, ada beberapa istilah yang biasa dipergunakan dalam pengertian pendidikan, yaitu sebagai berikut :

- a. **Ta'lim**, terdapat dalam QS Al-Baqarah (2):31 “Dan Allah mengajarkan kepada Adam segala nama, kemudian ia berkata kepada malaikat, ‘beritahukanlah Aku semua nama-nama itu jika kamu benar’”.
- b. **Tarbiyah**, dalam QSAI-Isra'(17):24 “... wahai Tuhanku sayangilah keduanya sebagaimana mereka mendidiku di waktu kecil.
- c. **Ta'dib**, terdapat dalam salah satu hadit Nabi, “ Allah mendidiku, maka Dia memberikan kepadaku sebaik-baik pendidikan.

Kemudian didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.

Menurut Jamil Shaliba dari lembaga bahasa Arab Damaskus mengemukakan pendapatnya tentang pendidikan, yaitu pengembangan fungsi-fungsi psikis melalui latihan sehingga mencapai kesempurnaannya sedikit demi sedikit.

Menurut M. J Langeveld mendefinisikan bahwa pendidikan adalah kegiatan membimbing anak manusia menuju kedewasan dan kemandirian.

Menurut Kingsley Price mengemukakan pendidikan ialah proses ketika kekayaan budaya nonfisik dipelihara atau dikembangkan dalam mengasuh anak-anak atau mengajar orang dewasa.

Dari beberapa pengertian tersebut , kita mendapati persamaan dan perbedaan antara politik dan pendidikan. Persamaannya, politik dan pendidikan sama-sama berkaitan dengan urusan manusia hidup didunia, sama-sama sebagai salah satu alat atau jalan manusia untuk mencapai tujuannya, dan manusia sama sekali tidak bisa dikatakan apolitis dan tidak berpendidikan secara total. Manusia sekecil apa pun tetap berpolitis dan berpendidikan. Perbedaannya, politik lebih berkaitan dengan pencapaian posisi manusia dalam wilayah atau sebuah kekuasaan, baik itu skala besar ataupun skala kecil, sementara pendidikan lebih pada pencapaian manusia memperoleh pengetahuan, kecerdasan, dan keterampilan untuk persiapan hidup kedepan atau terjun dalam masyarakat yang lebih luas.

Namun ini harus dibedakan dengan pendidikan politik pendidikan yang pengertian dan wilayahnya sebagai berikut :

- a. Pendidikan politik adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik bagi perannya didunia politik.
- b. Pendidikan politik berorientasi pada bagaimana peserta didik menjadi manusia yang melek politik.
- c. Pendidikan politik lebih banyak berbicara mengenai usaha untuk “memellekpolitikkan” peserta didik bisa dicapai secara efektif, misalnya saja tentang sistem pengajaran, metode pengajaran, kurikulum pendidikan, dan sebagainya.

- d. Pendidikan politik lebih banyak berbicara mengenai sejauh mana sistem pemerintahan, hak dan kewajiban warga Negara, pemilu dan sebagainya.
- e. Pendidikan politik setara pengertiannya dengan pendidikan ekonomi, pendidikan agama, dan sebagainya

2. Kebijakan Politik Pendidikan di Indonesia

Kata kebijakan merupakan bentuk turunan dari kata bijak yang memiliki awalan ke dan akhiran an. Di dalam KBBI (Kamus Lengkap Bahasa Indonesia), kata bijak memiliki arti selalu menggunakan akal budinya, mahir, pandai dan pandai bercakap-cakap. Dalam bahasa Inggris, kebijakan diartikan sebagai policy yang berarti plan of action (rencana kegiatan) atau statemen of aims (pernyataan yang diarahkan. Adapun yang dimaksud kebijakan adalah pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk mencapai sasaran, garis haluan. Politik adalah segenap pengetahuan yang berkaitan dengan ketatanegaraan atau kenegaraan; segala urusan dan tindakan kebijaksanaan, siasat dan sebagainya mengenai pemerintahan sesuatu negara atau terhadap negara lain.

Pengertian kebijakan pendidikan sebagaimana dikutip oleh Ali Imran dari *Carter V. Good* bahwa kebijakan pendidikan adalah suatu pertimbangan yang didasarkan atas sistem nilai dan beberapa penilaian terhadap faktor-faktor yang bersifat situasional. Pertimbangan tersebut dijadikan sebagai dasar untuk mengoperasikan pendidikan yang bersifat melembaga serta merupakan perencanaan umum yang dijadikan sebagai pedoman untuk mengambil keputusan agar tujuan yang bersifat melembaga dapat tercapai.

Kebijakan bisa diartikan layaknya pengertian kurikulum, pengertian kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi

dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Secara Etimologis , kurikulum merupakan terjemahan dari kata *curriculum* berasal dari bahasa latin *currere* yang berarti cepat, maju dengan cepat, merambat, tergesa-gesa, menjelelahi, menjalani, dan berusaha untuk. (Hasibuan, 1979). *Currere* berasal dari kata *cursus* yang lazim diindonesiakan menjadi “kursus”. Jika dikaitkan dengan kata lain, misalnya *vitae* ,bisa berarti riwayat atau perjalanan. Dengan demikian, *curriculum vitae* berarti riwayat hidup (Echols, 1984).

Didalam sejarah pendidikan di Indonesia, pada rentang waktu tahun 1945-1949 dikeluarkan kurikulum 1947. Pada tahun 1950-1961 ditetapkan kurikulum 1952. Kurikulum terakhir pada masa Orde Lama adalah Kurikulum 1964. Masa Orde Baru lahir empat kurikulum. Kurikulum 1968 ditetapkan dan berlaku sampai tahun 1975. Selanjutnya, muncul kurikulum 1975. Pada tahun 1984 dibuat kurikulum baru dengan nama kurikulum 1975 yang disempurnakan dengan pendekatan Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA). Pada tahun 1994 dikeluarkan kurikulum baru yakni Kurikulum 1994. Kurikulum itu menjadi Kurikulum terakhir yang dikeluarkan oleh Orde Baru.

Pada Masa Era reformasi , muncul Kurikulum 2004 yang dikenal dengan nama kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang pada tahun 2006 dilengkapi dengan standar isi dan standar kompetensi (sisko) yang memandu sekolah menyusun Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).

Dari perjalanan sejarah kurikulum nasional tersebut A. Fery T. Indarto mencermati bahwasanya penyusunan kurikulum yang silih berganti di Indonesia itu menunjukkan betapa kekuasaan ikut campur terlalu dalam pada persoalan pendidikan. Oleh karenanya ia berkesimpulan bahwa kurikulum yang berlaku dalam suatu Negara , termasuk Indonesia , sering digunakan sebagai sarana indoktrinasi dari suatu sistem kekuasaan.

Sampai sejauh ini, pendidikan di Indonesia menggunakan satu kurikulum, yaitu kurikulum nasional yang dipakai sebagai acuan tunggal. Semua lembaga pendidikan formal dinegeri ini, baik di kota besar, pelosok gunung, maupun dipinggiran pantai, mempunyai kurikulum sama. Oleh karenanya, proses pendidikan yang diterapkan adalah dalam upaya membentuk keseragaman berpikir. Melalui proses pendidikan nasional, generasi muda Indonesia dibentuk oleh sistem pendidikan yang mengacu kepada politik etatisme.

3. Peran Politik Pendidikan

a. Kepemimpinan Visioner

Kepemimpinan adalah *“Leadership is an attempt at influencing the activities followers through the communication process toward the attainment of some goals”* Gibson et.al (1985). Kepemimpinan visioner adalah pola kepemimpinan yang ditujukan untuk memberi arti pada kerja dan usaha yang perlu dilakukan bersama-sama oleh para anggota lembaga organisasi dengan cara memberi arahan dan makna pada kerja dan usaha yang dilakukan berdasarkan visi yang jelas.

Dalam kepemimpinan visioner, visi menjadi bagian penting dalam membangun organisasi, kepemimpinan yang efektif, mempunyai rencana yang matang dan berorientasi penuh pada hasil, mengadopsi visi-visioner baru yang menantang dalam menetapkan arah baru organisasi yang lebih baik. Dalam kepemimpinan visioner, pemimpin adalah juru bicara visi, pemimpin adalah agen perubahan bagi visi, dan pemimpin sebagai pelatih bagi visi. Kepemimpinan visioner = Tujuan bersama + orang-orang yang diberdayakan + perubahan organisasional yang tepat + pemikiran strategis.

Tidak semua tujuan dapat disebut visi, karena visi adalah tujuan yang memiliki persyaratan tertentu. visi hendaknya dapat menjadi acuan pemimpin dan para pengikutnya kearah tertentu untuk masa mendatang dan

dapat memberikan motivasi dalam melakukan perubahan. Lebih lanjut Wirawan (2002: 118) mengemukakan bahwa visi adalah apa yang diimpikan, keadaan masyarakat yang diciptakan, apa yang ingin dicapai oleh pemimpin dan pengikutnya dimasa yang akan datang. Sementara Bennis dan Nanus (1985: 80) menerapkan visi sebagai *“mental image of possible and desirable future state of the organization; a vision always refers to a future state a condition that does not presently exist and never existed before. Wish a vision, the leader provides the all important bridge from the present to the future of the organization”*.

Visi bukan hanya untuk kepentingan pemimpin melainkan juga para pengikutnya, oleh karena itu dalam menciptakan visi seorang pemimpin dapat melakukannya dengan berbagai cara, misalnya dengan melakukan penelitian sejarah perkembangan masyarakat atau mungkin melakukan dialog dengan berbagai pihak terkait.

Senge (1995) menjelaskan bahwa pemimpin memiliki kedudukan dan peran kritikal, karena ia sebagai desiner, guru dan sekaligus sebagai pramugara. Oleh karena itu, pemimpin berkewajiban memiliki sifat visioner terhadap masa depan sehingga kepemimpinan yang akan ia tampilkan bersifat visioner pula. Kepemimpinan visioner adalah kepemimpinan yang mampu melihat masa depan dan berbeda dengan kepemimpinan modern. Konsep kepemimpinan menurut Burt dan Nanus (2000) mengandung kemampuan-kemampuan pemimpin sebagai penentu arah, agen perubahan, juru bicara dan pelatih.

Pertama, pemimpin sebagai penentu arah. Disaat organisasi sedang mengalami kebingungan menghadapi beragam perubahan dan struktur baru, pemimpin visioner tampil sebagai pelopor penentu arah yang akan dituju melalui pikiran-pikiran yang cerdas dan mengarahkan perilaku-perilaku bergerak menuju arah yang dikehendaki.

Kedua, pemimpin sebagai agen perubahan. Pemimpin visioner bertanggung jawab untuk merangsang perubahan lingkungan internal, ia

tidak nyaman dengan situasi organisasi yang statis dan status quo, ia memimpikan kesuksesan organisasi melalui gagasan-gagasan baru yang memicu kinerja dan menerima tantangan dengan menerjemahkannya kedalam agenda kerja yang jelas dan rasional.

Ketiga, pemimpin sebagai juru bicara. Pemimpin visioner tidak saja memiliki kemampuan meyakinkan orang dalam kelompok internal, tetapi juga kemampuan memperluas aksesibilitas pada lingkungan eksternal untuk memperkenalkan dan mensosialisasikan keunggulan visi organisasi. Pemimpin visioner adalah seorang negosiator utama dan ulung dalam hubungan dengan organisasi lain atau hierarki yang lebih tinggi.

Keempat, pemimpin sebagai pelatih. Pemimpin visioner adalah pemberi teladan, pemberi semangat, pembangun rasa percaya diri, dan pemberi penghargaan atas keberhasilan orang lain, ia mampu mengkomunikasikan, mensosialisasikan, dan bekerjasama dengan orang-orang untuk membangun, mempertahankan, dan mengembangkan visinya.

Perbedaan utama antara pemimpin dan manajer terletak pada visinya. Kalau seorang pemimpin selalu mempunyai visi, sedangkan seorang manajer tidak selalu mempunyai visi. Yang dimaksud dengan visi adalah apa yang diimpikan

b. Kepemimpinan Transformasional

Kepemimpinan Transformasional merupakan model kepemimpinan bagi seorang pemimpin yang cenderung untuk memberikan motivasi kepada bawahan untuk bekerja lebih baik serta menitikberatkan kepada perilaku untuk membantu transformasi antara individu dengan organisasi. Gaya kepemimpinan transformasional, meliputi:

1. Charisma/ Idealized influence
2. Inspirational Motivation

3. Intellectual Stimulation

4. Individualized Consideration

Kepemimpinan transformational muncul dilatarbelakangi oleh pola pikir ahli manajemen yang sudahberwawasan cukup baik dalam mengidentifikasi konsep manajemen mutakhir. Burn (1978) menjelaskan bahwa kepemimpinan transformational sebagai suatu proses yang pada dasarnya “para pemimpin dan pengikut saling meneikan diri ketingkat moralitas dan motivasi yang lebih t inggi”. Pemimpin transformational memiliki visi yang jelas, memiliki gambaran holistic yang jelas tentang bagaimana organisasi dimasa depan ketika semua tujuan dan sasarannya telah tercapai. Kepemimpinan Transformational dapat dipandang secara makro dan mikro. Jika dipandang secara mikro kepemimpinan transformational merupakan proses saling mempengaruhi antar individu, sementara secara makro merupakan proses memobilisasi kekuatan untuk mengubah sistem social dan kelembagaan.

Kepemimpinan transformational dikemukakan untuk menjawab tantangan zaman yang penuh dengan perubahan. Zaman yang dihadapi saat ini bukan zaman ketika manusia menerima segala apa yang menyimpannya, tetapi zaman dimana manusia dapat mengkritik dan meminta yang layak dari apa yang diberikannya secaea kemanusiaan. Bahkan dalam terminologinya motivasi maslow, manusia di era ini adalah manusia yang memiliki keinginan mengaktualisasi dirinya. Yang berimplikasi pada bentuk pelayanan dan penghargaan terhadap manusia itu sendiri. Kepemimpinan transformational tidak saja didasarkan pada kebutuhan akan penghargaan diri, tetapi menumbuhkan kesadaran pad pemimpin untuk berbuat yang terbaik sesuai dengan kajian perkembangan manajemen dan kepemimpinan yang memandang manusia, kinerja, dan perumbuhan organsiasi adalah sisi yang paling mempengaruhi. Menurut Burn (1978) menjelaskan kepemimpinan

transformational sebagai suatu proses yang pada dasarnya “para pemimpin dan pengikut saling menaikkan diri ketingkat moralitas dan motivasi yang lebih tinggi. Para pemimpin adalah orang yang sadar akan prinsip perkembangan organisasi dan kinerja manusia sehingga berupaya mengembangkan segi kepemimpinannya secara utuh melalui pemotivasian terhadap staf dan kemanusiaan bukan didasarkan atas emosi seperti misalnya keserakahan, kecemburuan atau kebencian.

Pemimpin transformational adalah pemimpin yang memiliki wawasan jauh kedepan dan berupaya memperbaiki dan mengembangkan organisasi bukan untuk saat ini tetapi di masa mendatang. Oleh karena itu, pemimpin transformational adalah pemimpin yang dapat dikatakan sebagai pemimpin yang visioner. William B. Catetter (1996), mengaitkan administrasi pendidikan dengan mengembangkan struktur social yaitu “educational administration is a social process that place within the context of social system”.

Berdasarkan uraian diatas, menurut Nurdin disimpulkan bahwa fungsi administrasi pendidikan merupakan alat untuk mengalokasikan dan menintegrasikan peranan maupun fasilitas guna tercapainya tujuan sistem pendidikan. sedangkan secara operasional, merupakan proses mengatur hubungan manusia dengan manusia yang ada dalam sistem pendidikan tersebut. Sehingga tidaklah berlebihan jika dikatakan demikianlah pentingnya kedudukan administrasi pendidikan sehubungan dengan pengelolaan pendidikan perguruan tinggi. Inilah sekelumit kapasitas kepemimpinan yang dielaborasi melalui pendekatan dan tindakan kedua gaya dan model sangat berperan dengan cara menampilkan keunggulan bertindak sesuai dengan kaidah “visionary leadership” dan “Transformational leadership” yang diwujudkan melalui fungsi dosen sebagai tenaga akademik di suatu perguruan tinggi.

4. Perkembangan Politik Pendidikan di Indonesia

Setiap periode perkembangan pendidikan nasional adalah persoalan penting bagi suatu bangsa karena perkembangan tersebut menentukan tingkat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, karakteristik, dan kesadaran politik yang banyak mempengaruhi masa depan bangsa tersebut. Setiap periode perkembangan pendidikan adalah faktor politik dan kekuatan politik karena pada hakikatnya pendidikan adalah cerminan aspirasi, kepentingan, dan tatanan kekuasaan – kekuatan politik yang sedang berkuasa.

Ada empat strategi pokok pembangunan pendidikan nasional, yaitu :

1. Peningkatan pemerataan kesempatan pendidikan
2. Peningkatan relevansi pendidikan dengan pembangunan
3. Peningkatan kualitas pendidikan
4. Peningkatan efisiensi pengelolaan pendidikan.

Sketsa penyelenggaraan pendidikan di Negara ini dapat dibagi atas enam periode perkembangan, yaitu :

1. Periode pertama adalah periode awal atau periode prasejarah yang berlangsung hingga pertengahan tahun 1800an. Pada masa ini penyelenggaraan pendidikan di tanah air mengarah pada sosialisasi nilai – nilai agama dan pembangunan keterampilan hidup. Penyelenggaraan pendidikan pada periode ini dikelola dan dikontrol oleh tokoh – tokoh agama.
2. Periode kedua adalah periode kolonial Belanda yang berlangsung dari tahun 1800an hingga tahun 1945. Pada periode ini penyelenggaraan pendidikan di tanah air diwarnai oleh proses modernisasi dan pergumulan antara aktivitas pendidikan pemerintahan colonial dan aktivitas pendidikan kaum pribumi. Disatu pihak, pemerintah colonial berusaha menempuh segala cara untuk memastikan bahwa berbagai kegiatan

pendidikan tidak bertentangan dengan kepentingan kolonialisme dan mencetak para pekerja yang dapat dieksploitasi untuk mendukung misi sosial, politik, dan ekonomi pemerintah kolonial.

3. Periode ketiga adalah periode pendudukan Jepang yang berlangsung dari tahun 1942 hingga tahun 1945. Berbagai kegiatan pendidikan pada periode ini diarahkan pada upaya mendiseminasi nilai – nilai dan semangat nasionalisme serta mengobarkan semangat kemerdekaan ke seluruh lapisan masyarakat. Salah satu aspek perkembangan dunia pendidikan pada masa periode ini adalah dimulainya penggunaan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam lingkungan pendidikan formal.
4. Periode keempat adalah periode Orde Lama yang berlangsung dari tahun 1945 hingga tahun 1966. Pada periode ini kegiatan pendidikan di tanah air lebih mengarah pada pemantapan nilai – nilai nasionalisme, identitas bangsa, dan pembangunan fondasi ideologis kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan utama pendidikan pada periode ini adalah nation and character building dan kendali utama penyelenggaraan pendidikan nasional dipengang oleh tokoh – tokoh nasionalis.
5. Periode kelima adalah periode Orde Baru yang berlangsung dari tahun 1967 hingga tahun 1998. Pada periode ini pendidikan menjadi instrument pelaksanaan program pembangunan di berbagai bidang, khususnya bidang pedagogi, kurikulum, organisasi, dan evaluasi pendidikan diarahkan pada akselerasi pelaksanaan pembangunan. Karena focus utama pembangunan nasional pada era Orde Baru adalah pada bidang ekonomi.
6. Periode keenam adalah periode Reformasi yang dimulai pada tahun 1998. Pada periode ini semangat desentralisasi, demokratisasi, dan globalisasi yang dibawa oleh gerakan reformasi sehingga penataan system pendidikan nasional menjadi menu utama. Dengan menelusuri prinsip – prinsip

penerapan yang diatur dalam berbagai peraturan perundang – undangan terkait.

PENUTUP

Pengertian kebijakan adalah layaknya kurikulum yakni seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Peran Politik Pendidikan terdapat dua bagian:

1. Kepemimpinan Visioner

Kepemimpinan adalah *“Leadership is an attempt at influencing the activities followers through the communication process toward the attainment of some goals”* Gibson et.al (1985). Kepemimpinan visioner adalah pola kepemimpinan yang ditujukan untuk memberi arti pada kerja dan usaha yang perlu dilakukan bersama-sama oleh para anggota lembaga organisasi dengan cara memberi arahan dan makna pada kerja dan usaha yang dilakukan berdasarkan visi yang jelas.

2. Kepemimpinan Transformasional

Kepemimpinan Transformasional merupakan model kepemimpinan bagi seorang pemimpin yang cenderung untuk memberikan motivasi kepada bawahan untuk bekerja lebih baik serta menitikberatkan kepada perilaku untuk membantu transformasi antara individu dengan organisasi. Gaya kepemimpinan transformasional, meliputi:

1. Charisma/ Idealized influence
2. Inspirational Motivation
3. Intellectual Stimulation

4. Individualized Consideration

Setiap periode perkembangan pendidikan nasional adalah persoalan penting bagi suatu bangsa karena perkembangan tersebut menentukan tingkat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, karakteristik, dan kesadaran politik yang banyak mempengaruhi masa depan bangsa tersebut. Setiap periode perkembangan pendidikan adalah faktor politik dan kekuatan politik karena pada hakikatnya pendidikan adalah cerminan aspirasi, kepentingan, dan tatanan kekuasaan – kekuatan politik yang sedang berkuasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad Rifai, *Politik Pendidikan Nasional*, AR-RUZZ MEDIA, Jogjakarta, 2011. 15.
- Muhammad Rifai, *Politik Pendidikan Nasional*, AR-RUZZ MEDIA, Jogjakarta, 2011. 16.
- Muhammad Rifai, *Politik Pendidikan Nasional*, AR-RUZZ MEDIA, Jogjakarta, 2011. 165-166.
- Abd. Rachman Assagaf, *Internationalisasi Pendidikan, Sketsa Perbandingan Pendidikan di Negara-Negara Islam dan Barat*. Yogyakarta: Gama Media, 2003.
- Abuddin Nata, *Kapita Selekta Pendidikan Islam* . Bandung: Angkasa, 2003.
- Ali Imron, *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia: Proses, Produk, dan Masa Depan*, Ed. I, Cet. II ,Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Budiono, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*(Surabaya: Karya Agung, 2005.
[http: //www.scribd.com/doc/2058421/politik-indonesia](http://www.scribd.com/doc/2058421/politik-indonesia)